

Partai dan Pendidikan Politik
(Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Oleh

Dr.Hasanuddin, M.Si.
Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si
Drs.H.Ishak, M.Si

Abstrak

Reformasi politik membawa implikasi penting bagi perkembangan demokrasi. Sementara instrumen penting dalam demokrasi adalah partai politik. Sedangkan keberadaan partai politik tanpa pendidikan politik menyebabkan demokrasi menjadi stagnan yang dapat menghambat upaya reformasi. Argumentasi ini menunjukkan begitu signifikannya hubungan antara Reformasi, Demokrasi, Partai Politik dan Pendidikan Politik. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kedua, menganalisis dan menjelaskan kendala peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang didukung data dokumentasi. Hasil penelitian meunjukkan bahwa pertama, peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik hanya difahami oleh masyarakat pada normatifnya. Dominan diakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap peran partai, tidak lebih sebagai bagian instrumen pemerintahan yang melebur menjadi legislatif (DPRD) yang lebih berorientasi vertikal (ke pemerintahan atau kekuasaan), bukan horizontal (ke masyarakat). Dan partai tidak punya kewajiban melaksanakan pendidikan politik warga. Kedua, kendala utama yang menyebabkan dominannya pemahaman masyarakat tersebut yang dihadapi partai, selain tingkat pendidikan masyarakat dan komunikasi politik partai yang belum intens (tidak berjalan), peran pendidikan politik yang tidak jalan adalah faktor penting yang menjadi kendalanya.

Kata kunci: Reformasi, Demokrasi, Partai Politik, dan pendidikan politik masyarakat

A. Latar Belakang Masalah

Memahami peran partai politik di Indonesia berhubungan erat dengan pelaksanaan demokrasi. Arti hubungan itu sekaligus memahami peran partai politik sebagai penyerap aspirasi. Dalam hubungan dengan perkembangan demokrasi itu pula maka aspirasi bagian esensi dari demokrasi yang harus didesiminasikan. Oleh karena itu wajar jika partai politik merupakan gambaran wajah dan peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Kedinamikaan kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi menjadikan peran penyerap aspirasi sebagai instrumen utama yang harus diperjuangkan. Sebab secara teoritikal makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan, khususnya di era Reformasi saat ini.

Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan bangsa mulai dari desa dan perkotaan. Sejauh ini memang juga difahami jika partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Realita ini disebabkan kepentingan pragmatisme yang secara teori tidak optimal menjalankan fungsi partai sebagai penyerap aspirasi rakyat.

Untuk selanjutnya dalam konteks menelusuri peran itu pula penting dilakukan penelitian sebagai langkah untuk mengidentifikasi kembali peran partai tersebut. Sehingga harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan.

Sedangkan Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar menjadi penting sebagai daerah penelitian oleh karena merupakan bagian dari instrumen pendidikan Labor Ilmu Pemerintahan (IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR). Dengan melakukan kajian terkait pendidikan politik kewargaan dapat menjadi salah satu barometer memahami pendidikan politik di desa yang menjadi refleksi dalam kerangka berpikir induktif ilmiah bagi kepentingan penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pelbagai penjelasan dan fenomena yang menjadi latarbelakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar?
2. Apa saja yang menjadi kendala peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
2. Menganalisis dan menjelaskan kendala peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara akedemis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi teoritik dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusus peran partai politik di Riau khususnya dan Indonesia umumnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan kontribusi sebagai rujukan empirik bagi pembuat dan pengambil kebijakan peran partai politik di Riau khususnya dan Indonesia umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah negara dengan sistem demokrasi, membutuhkan sebuah organisasi politik yang menjadi instrumen demokrasi. Organisasi tersebut biasa disebut Partai Politik. Secara definitive, Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo 2005) mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir untuk merebut atau mempertahankan

kekuasaan dengan maksud mensejahterakan anggotanya, baik untuk kebijaksanaan, keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materil.

Partai politik juga dapat didefinisikan sebagai kelompok warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.

Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Adapun jenis-jenis partai politik dikategorikan bermacam-macam oleh para ahli politik. Max Weber mengategorikan partai politik menjadi 2 jenis yakni partai elit dan partai massa. Secara tidak langsung, Max Weber mengategorikannya berdasar dari model pembiayaan partai yang secara otomatis menunjukkan pemilihnya. Partai elit didefinisikan sebagai partai yang didukung oleh kalangan elit dalam sistem masyarakat, semisal pengacara, doktor, pengusaha, dan lain-lain.

Sementara itu, partai massa didefinisikan sebagai partai yang didukung oleh kalangan masyarakat bawah. Franz Neumann mengategorikan partai politik menjadi 2 jenis, yakni *democratic integrative party* and *the totalitarian integrative party*. Franz Neumann mengategorikannya berdasar pada usaha partai dalam mengintegrasikan nilai-nilai politiknya. *Democratic integrative party* didefinisikan sebagai partai yang melakukan kegiatan yang secara demokratis.

Partai politik melaksanakan suatu tugas penting di dalam pemerintahan. Partai politik bersama masyarakat berusaha mencapai kontrol pemerintahan, menciptakan

kebijakan yang baik sesuai kepentingan mereka atau kelompok yang mendukung mereka, serta mengorganisir dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu. Walaupun sangat banyak yang dilibatkan di dalam menjalankan pemerintahan pada semua tingkat, partai politik bukanlah pemerintah.

Tujuan dasar partai politik adalah mencalonkan orangnya untuk jabatan publik dan untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih. Ketika terpilih, pejabat-pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan partai mereka melalui proses legislasi dan inisiatif program. Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi.

Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara/pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya. menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiarjo: 404) mendefinisikan partai politik adalah sekompok manusia yang terorganisir sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan kekuasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Sedangkan menurut Sigmund Neumann (Miriam Budiarjo:404) mengatakan bahwa Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Skop Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh data yang berasal dari informan. Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sementara itu skop penelitian ini meliputi waktu (rentang) 2009-2011 setelah pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah di kabupaten Kampar.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui metode penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data sekunder melalui metode perpustakaan (*library research*). Tekni pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan penelitian lapangan (*field research*). Selain melalui wawancara dengan key informan, pengumpulan data kualitatif juga dilakukan melalui diskusi dengan teknik FGD (*focus group discussion*).

4. Analisa Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara diskriptif analisis kualitatif. Analisis diskriptif dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian ditranskrip dan disusun berdasarkan tema sesuai petunjuk wawancara. Analisis dilakukan berdasarkan argumentasi, kalimat dan pernyataan yang disebut informan. Kemudian hasil analisis akan dituliskan dalam bentuk laporan penelitian.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan reformasi politik dan demokrasi memberikan arti penting bagi kehadiran partai politik. Sementara keberadaan partai politik merupakan justifikasi bagi peningkatan kecerdasan masyarakat terhadap politik. Oleh karena itu, tanpa pendidikan politik dapat dimaknai jika kehadiran politik telah kehilangan peranannya.

Berdasarkan pada argumentasi yang telah dikemukakan tersebut hasil penelitian tentang peran politik bagi pelaksanaan pendidikan politik warga di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah bagian mengu[ayajan terhadap keberadaan partai politik dalam berlangsungnya proses demokrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya jika Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat berlandaskan kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu tentang masyarakat yang dicita-citakan. Selanjutnya organisasi tersebut digunakan untuk menciptakan masyarakat yang cita-citakan melalui cara-cara yang sah yaitu dengan mendapatkan kekuasaan di bidang politik.

1. Peran Partai Dalam Pendidikan Politik Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya jika reformasi politik membawa implikasi penting bagi perkembangan demokrasi. Sementara instrumen penting dalam demokrasi adalah partai politik. Sedangkan keberadaan partai politik tanpa pendidikan politik menyebabkan demokrasi menjadi kehilangan maknanya yang dapat menghambat upaya reformasi. Argumentasi ini menunjukkan begitu signifikannya hubungan antara Reformasi, Demokrasi, Partai Politik dan Pendidikan Politik

Oleh karena itu, peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik harus difahami oleh masyarakat secara esensinya. Secara umum mereka mengakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap peran partai, tidak lebih sebagai bagian instrumen pemerintahan yang melebur menjadi legislatif (DPRD) yang lebih

berorientasi vertikal yakni ke pemerintahan atau kekuasaan, bukan horizontal yakni ke masyarakat).

Menyangkut keberadaan partai politik tersebut, maka berikut akan dijelaskan berdasarkan peran yang dilihat dari fungsi partai politik di Desa Buluh Cina dalam melaksanakan pendidikan politik warga.

a. Sosialisasi politik

Peran partai yang penting salah satunya adalah melaksanakan Sosialisasi politik. Dalam hubungan ini terjadi proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik ini pula masyarakat mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya politik politik dalam bentuk perilaku politik yang konstruktif. Selanjutnya, proses ini akan mengutamakan konsensus dibanding menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Untuk selanjutnya, peran ini mempunyai pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan yang kemudian perilaku seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan demokrasi.

b. Rekrutmen politik

Selanjutnya, peran partai adalah melakukan rekrutmen politik. Peran ini merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang.

Dalam konteks demokrasi meskipun individu di sini diberikan kesempatan sama untuk mencapai derajat tertentu, untuk mendapatkan suatu hal tetapi ada aturan bagaimana cara individu tersebut mencapai hal tersebut melalui undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan adanya partai politik, maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginannya di bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit.

c. Partisipasi politik

Selain sosialisasi dan rekrutmen, peran partai politik adalah fungsi komunikasi dan sosialisasi politik membawa pencerahan yang objektif dan rasional untuk kegiatan politik masyarakat. Dengan fungsi tersebut kemudian akan memunculkan kesadaran masyarakat terkait nasibnya di masa yang akan datang. Nasib mereka di masa datang sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, presiden, gubernur atau wali kota dan bupati.

Ini juga menyangkut keberadaan dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Melalui pihak-pihak inilah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan kepemimpinan pemerintah.

d. Pemandu kepentingan

Kemudian, peran partai politik adalah untuk memandu atau mengarahkan (menuntun) kepentingan masyarakat. Ini berkaitan di dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acapkali bertentangan. Ini, seperti

antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi canggih, tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit. Sementara, kehendak untuk mendapat dan mempertahankan pekerjaan, antara kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi, tetapi dengan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan. Oleh karena itu, peran partai sebagai pemandu dapat mengakomodir konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, berbagai alternatif kebijakan umum, akan diperjuangkan partai dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.

e. Komunikasi politik

Pada tahap lanjutannya, peran partai yang ada dan diakui adalah sebagai penjabatan pelbagai kepentingan khususnya masyarakat. Dari sini, peran komunikasi politik partai menjadi penting. Ini dimaksudkan sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting terutama di pedesaan. Ini disebabkan Pemerintah akan dapat mempertahankan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya.

Berdasarkan hal itu, maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki. Partai politik ini berada di antara pemerintah dan masyarakat, sehingga sangat strategis posisinya dalam hubungan ini. Dalam hubungan ini yang diperlukan adalah objektivitas partai dalam

melakukan perannya. Khususnya sebagai penghubung (media) yang memerankan komunikasi politik yang lebih objektif antara pemerintah dan masyarakat.

f. Pengendalian konflik

Adapun peran partai sebagai pengendali konflik. Dalam hubungan ini berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan di sini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat di mana pun tak terkecuali di pedesaan dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral.

Dalam hubungan ini pula akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan. Hal ini akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Ini disebabkan konflik dalam masyarakat itu tidak dapat dihilangkan, tetapi yang harus dilakukan yang mana peran partai melakukan manajemen konflik. Ini agar konflik tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan di desa. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

g. Kontrol politik

Untuk yang terakhir peran politik sebagai kontrol politik. Ini dimaksudkan agar kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan

kemudian menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Baik buruknya kebijakan tentunya sangat dapat diperdebatkan mengingat kebijakan pemerintah tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang.

Permasalahan yang muncul adalah kepada siapa kebijakan itu akan memberi keuntungan. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu akan diberikan.

Oleh karena itu ketika suatu kebijakan telah dibuat dan diimplementasikan pun peran partai politik masih diperlukan untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk apa kebijakan itu dibuat. Ketika kebijakan itu sudah menjadi keputusan tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang telah direncanakan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah. Faktor pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh, karena dibanyak kasus banyak kebijakan itu gagal atau kurang berhasil yang diakibatkan oleh pelaku atau oknum yang mengejar kepentingan pribadi.

2. Kendala partai dalam pendidikan politik

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, berbicara mengenai peran partai yang ada, tak lepas dari kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran tersebut. Partai politik yang pada akhir-akhir ini populer pada saat akan diselenggarakannya pemilihan umum (legislatif, misalnya). Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik pada saat tidak adanya proses demokrasi cenderung tidak kelihatan aktivitasnya. Inilah yang mengakibatkan fungsi-fungsi partai politik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama yang berkenaan dengan fungsi yang kedua yaitu sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat.

Sebuah partai agar mendapat dukungan dari masyarakat, partai tersebut harus mampu membuka pandangan tentang demokrasi, nilai-nilai kebangsaan dan hak-hak warganegara. Di samping itu partai politik harus mampu menjadikan masyarakat memahami posisinya sebagai warganegara dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politiknya.

Pada konteks kendala yang dihadapi, mereka umumnya mengakui bahwa pemahaman peran partai dalam konteks pemerintahan formal. Masyarakat mengakui jika partai adalah bagian dari pemerintahan. Ini disebabkan partai diasosiasikan dengan lembaga pemerinatahn di bidang legislaif (DPR-D). Argumentasi meski dilandasi asas dugaan juga mengemuka jika lembaga dewan adalah perwakilan partai. Sebab, keberadaan frkasi di DPRD menjadi bukti bahwa dewan adalah indentik dengan partai. Oleh karena itu, peran partai dalam melakukan pendidikan politik yang dapat diidentifikasi melalalui ketujuh perannya sesungguhnya adalah peran institusional bukan individual. Dari sini masyarakat mangakui bahwa selama ini partai diakui belum melakukan perannya dalam pendidikan politik yang maksimal.

Memahami realitas ini masyarakat meyakini bahwa kendalanya bukan berasal dari partai melainkan dari pemahaman anggota atau pengurus partai yang minim. Dalam hubungan ini masyarakat juga mengakui, meski yang memilih adalah mereka, tetapi sistem yang menentikan. Sementara masyarakat hanya bagian proses pertengahan, bukan awal dan akhir. Sehingga tidak menentukan.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik hanya difahami oleh masyarakat dalam pada normatifnya. Dominan diakui bahwa pemahaman masyarakat

terhadap peran partai, tidak lebih sebagai bagian instrumen pemerintahan yang melebur menjadi legislatif (DPRD) yang lebih berorientasi vertikal (ke pemerintahan atau kekuasaan), bukan horizontal (ke masyarakat). Dan partai tidak punya kewajiban melaksanakan pendidikan politik warga.

2. Kendala utama yang menyebabkan dominannya pemahaman masyarakat tersebut yang dihadapi partai selain tingkat pendidikan masyarakat dan komunikasi politik partai yang belum intens (tidak berjalan) adalah faktor penting yang menjadi kendalanya.

DAFTAR BACAAN

- Alfian. 1991. *Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Jokjakarta: Pustaka Pelajar.
- Butler, P & N. Collin, 2001. *Payment on Delivery: Recognising Constituency Service as Political Marketing*. *European Journal of Marketing*. (35), 9-10. *Chapter 3*.
- Baines, Paul. Fritz Plasser & Christian Scheucher. 1999. *Operationalising Political Marketing: A Comparison of US and Western European Consultants and Managers*. Middlesex University Discussion Paper Series, No. 7, July 1999.
- Dhurorudin Masnad. 1998. *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol ABRI*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Firmansyah. 2007. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: YayasanObor Indonesia.
- Hartono Mardjono. 1998. *Reformasi Politik Suatu Keharusan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Miriam Budiarjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ramlan A. Surbakti. 1998. *Reformasi Kekuasaan Presiden*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tim Peneliti Sistem Pemilu. 1998. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta:

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004. Jakarta: Restu Agung, Cetakan ke I.

Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang, Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.